

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI LINGKUNGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)

Intan Wahyuningsih, Wahyu Meiranto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of good corporate governance and government regulation on the environmental accounting information disclosure. Variabel used in the examination are board gender diversity, environmental committee delegation, institutional ownership, foreign ownership and government regulation as the independent variabel and environmental accounting information disclosure as the dependent variabel. The population of this study is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2016-2019. Sampling based on purposive sampling method with 72 total sample. Data analysis was performed classical assumption and hypothesis testing using linear regression. The result of this study indicates that the directors gender diversity and foreign ownership have positive and negatif significant effect on environmental accounting information disclosure. Meanwhile, environmental committee delegation and government regulation have positive and insignificant on environmental accounting information disclosure. Whereas, institutional ownership has a negatif and insignificant effect on environmental accounting information disclosure.

Keyword: *good corporate governance, government regulation, environmental accounting information disclosure, manufacturing companies*

PENDAHULUAN

Di mata dunia, isu-isu lingkungan yang disebabkan karena aktivitas industri semakin mencuat sehingga mendapat kecaman masyarakat dan menjadi sangat serius ketika permasalahan ini dibahas hingga ke dalam konferensi tingkat internasional, dimana sektor industri dinilai sebagai penyumbang kerusakan lingkungan terbesar (Susilo, 2008). Carolina dan Martusa (2012) mengungkapkan bahwa fakta lapangan menunjukkan supresi global dan desakan publik terhadap korporasi untuk ikut bertanggung jawab mengatasi krisis lingkungan semakin tinggi. Setiap aktivitas korporasi diharapkan dapat memberikan timbal balik yang relevan dalam harmonisasi pembangunan industri dengan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan masyarakat luas.

Kasus kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri yang menjadi ancaman lingkungan dan sosial yang mendapat tuntutan besar dan telah diatur dalam perundang-undangan diantaranya adalah pencemaran udara (*air pollution*) yang menimbulkan ancaman lingkungan pada kota-kota besar yang saat ini atmosfernya telah tercemar oleh ratusan sintesis kimia. Terdapat puluhan dari ratusan sintesis kimia yang berpotensi mendatangkan penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) hingga penyakit kulit. Kasus pencemaran air (*water pollution*) ditinjau dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) air sungai di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 68%-nya tergolong dalam tingkatan tercemar berat. Dan kerusakan lingkungan lainnya yang di timbulkan oleh aktivitas industri ialah pencemaran tanah (*land pollution*). Tantangan tersulit dalam menangani masalah lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah, yaitu yang bersumber dari sebagian besar zat-zat kimia berbahaya dan residu radioaktif sehingga menghasilkan limbah industri beracun (Ridwan, 2016; Hidayat, 2018).

¹ *Corresponding author*

Penting bagi perusahaan untuk lebih menaruh kepedulian terhadap lingkungan atas dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas operasinya untuk membangun citra perusahaan yang baik bahwa suatu entitas bisnis tidak hanya berfokus pada perolehan laba semata. Perusahaan membutuhkan sistem pelaporan terintegrasi yang didalamnya menjelaskan tentang pelaporan lingkungan untuk dapat menjelaskan bagaimana upaya tersebut dapat menghasilkan nilai, strategi, risiko, ancaman dan peluang serta pengukuran kinerja yang relevan terhadap tujuan strategis perusahaan. Selain itu, melalui pelaporan lingkungan, perusahaan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholder* dan juga publik atas upaya yang telah dilaksanakan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, belum terdapat standar akuntansi keuangan yang mewajibkan suatu korporasi melakukan pengungkapan informasi lingkungan (Warjono, 2009). Hal ini mendorong perusahaan berupaya menghindari pengungkapan informasi mengenai lingkungan ataupun pembangunan berkelanjutan di laporan keuangan ataupun pelaporan tahunannya. Meskipun dilakukan, semata hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi ataupun motif bisnis yang berhubungan dengan promosi, pemasaran, pencitraan, pembentukan nama baik daripada motif sukarela untuk berperan aktif mengatasi krisis sosial dan lingkungan (Lako, 2018).

Akuntansi hijau atau lingkungan dipandang sebagai alat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang peran badan usaha dalam suatu perekonomian terhadap keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Maama & Appiah, 2019). *Green accounting* atau dapat disebut juga akuntansi lingkungan merupakan praktik akuntansi yang didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang menghasilkan informasi dalam bentuk pelaporan tentang analisa biaya dan manfaat lingkungan (M. Hidayat, 2016). Akuntansi lingkungan merupakan sarana manajemen yang dimanfaatkan manajer dan entitas bisnis.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang beragam dan masih memiliki ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian serupa. Kemudian, sebuah studi yang menghubungkan dua variabel independen tentang *good corporate governance* dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan di perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masih jarang ditemukan sehingga topik penelitian ini menarik untuk dibahas lebih jauh. Penelitian Maama dan Appiah (2018) menunjukkan hasil penelitian dampak, kebijakan dan prinsip lingkungan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi hijau atau lingkungan. Kemudian, penelitian yang dilakukan Tingbani dkk. (2020) menunjukkan hasil penelitian keberagaman gender dewan direksi dengan arah positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela GHG, sedangkan antara komite lingkungan terhadap pengungkapan sukarela GHG menunjukkan hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliawati, dkk., (2020) menunjukkan hasil penelitian kepemilikan institusional mempunyai arah positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan entitas. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Julekhah dan Rahmawati (2019) menghasilkan temuan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Faisal, dkk. (2020) didapatkan temuan penelitian peraturan pemerintah menunjukkan arah positif dan signifikan pada pelaksanaan *Corporate Social and Environment Responsibility Disclosure* (CSERD).

Studi ini memiliki tujuan untuk menelaah pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proksikan pada keberagaman gender dewan direksi, pendelegasian komite lingkungan, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan yang dinyatakan oleh Wong (2011) dukungan yang diberikan *stakeholders* akan memengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh suatu korporasi, termasuk

pada transparansi mengenai pelaporan hijau. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tanggung jawab atas kepentingan para *stakeholder* dalam menyampaikan seluruh informasi mengenai segala aktivitas operasi, termasuk aktivitas operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan maupun sosial melalui laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan (Sari et al., 2019).

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa legitimasi bisnis dapat dipandang sebagai interelasi antara penduduk setempat dengan korporasi atau antara korporasi dengan penduduk setempat yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, legitimasi merupakan sesuatu yang dapat dijadikan dasar vitalitas (*going concern*) bagi perusahaan (O'Donovan, 2002) dalam (Nor Hadi, 2011:87).

Keberagaman Gender Dewan Direksi dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan

Perusahaan perlu memiliki dewan yang dapat memberi perhatian lebih peka terhadap lingkungan dan sosial atas dampak dari aktivitas operasi perusahaan berikut dengan perhitungan anggaran dan biaya-biaya yang ditimbulkan agar kemudian dapat dilakukan transparansi melalui pengungkapan informasi lingkungan. Keberagaman gender dewan direksi didalam tata kelola perusahaan akan memberikan kolaborasi yang baik untuk memberikan dorongan bagi manajemen dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas dalam pengungkapan informasi lingkungan. Berkenaan dengan itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan

Pendelegasian Komite Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan

Dengan melakukan pendelegasian komite lingkungan, perusahaan dinilai serius dalam memberikan perhatiannya kepada lingkungan dan sosial (Peters dan Romi, 2014). Selain itu, perusahaan yang nilai yang dimiliki korporasi seperti salah satunya nilai-nilai lingkungan akan lebih mudah dipengaruhi oleh unit kerja khusus yang terkonsentrasi (Rao et al., 2012). Berkenaan dengan itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Pendelegasian komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan

Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan

Dalam membangun hubungan yang baik antara investor institusional dengan manajemen, perlu adanya komunikasi yang baik pula antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar transparansi atau keterbukaan informasi dapat dijalankan dengan optimal. Pengungkapan lingkungan akan ditunjang oleh pemegang saham institusional sebab pengungkapan lingkungan ialah wujud transparansi entitas kepada *stakeholder* atas komitemennya mengenai dampak lingkungan dan sosial aktivitas entitas (Sari et al., 2019).

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan

Kepemilikan Asing dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan

Ada beberapa alasan utama yang menjadi dasar pernyataan bahwa kepemilikan asing akan memberikan pengaruh pengungkapan tentang lingkungan yang lebih besar (Susanto, 1992 dalam Hasibuan, 2001). Alasan pertama, korporasi induk asing di luar negeri memiliki kompetensi unggul pada segi akuntansi. Alasan kedua, entitas asing mempunyai teknologi informasi dan komunikasi yang lebih andal juga efisien untuk dapat menyediakan urgensi domestik maupun eksternal perusahaannya. Jika dilihat dari sudut pandang teori *stakeholder*, kepemilikan asing yang terdapat di suatu perusahaan akan memberikan dukungan yang lebih besar dalam melakukan pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan

Regulasi Pemerintah dan Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan

Suatu korporasi atau organisasi perlu mendapatkan dorongan yang bersifat *mandatory* melalui regulasi pemerintah untuk dapat membangun korporasi yang berorientasi pada

pembangunan yang berkelanjutan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan ataupun *sustainability report*. Dalam konteks legitimasi, perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi TJSL didasarkan pada komitmennya untuk menunjukkan kepatuhannya kepada Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Berkenaan dengan itu hipotesis yang diajukan adalah:

H5 : Regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan

METODE PENELITIAN

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Studi ini memiliki tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel terikat dari studi ini adalah pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Variabel bebas dari studi ini adalah *good corporate governance* yang direpresentasikan dengan keberagaman gender dewan direksi, pendelegasian dewan komite lingkungan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing dan regulasi pemerintah. Sedangkan variabel kontrol studi ini adalah profitabilitas perusahaan dan ukuran perusahaan.

Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Y1)

Environmental accounting atau disebut akuntansi lingkungan merupakan cabang ilmu akuntansi berbasis lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal transparansi, praktik akuntansi lingkungan diungkapkan dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. Pengungkapan akuntansi lingkungan adalah wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memberikan keterbukaan informasi tentang hubungan suatu lembaga dengan masyarakat sekitar (Ramdhony, 2015). Untuk menghitung hasil akhir variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, setiap indikator PROPER diberikan skor penilaian antara skor 0 sampai 3 sesuai dengan kondisi *annual report* atau *sustainability report* perusahaan yang telah di deskripsikan di atas (Andreas Lako, 2011). Skor yang di dapatkan oleh perusahaan (pada masing-masing indikator) dijumlahkan kemudian dibagi dengan total indikator, yaitu 14 indikator.

$$EAD = \frac{\text{Total skor yang didapatkan oleh perusahaan}}{\text{Total indikator PROPER (14 indikator)}}$$

Keberagaman Gender Dewan Direksi (X1)

Dewan direksi perempuan memiliki keterlibatan yang lebih antusias, perencanaan terstruktur, independensi dan mutu lainnya yang mengakomodasi bilamana dewan direksi wanita dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam mengambil ketetapan mengenai pengungkapan lingkungan (Rao et al., 2011). Keberagaman gender dewan direksi diukur dengan menentukan proporsi anggota dewan direksi perempuan, yaitu total dewan direksi wanita dibagi total dewan direksi perusahaan (Tingbani et al., 2020).

$$EC = \frac{\text{Total dewan direksi perempuan}}{\text{Total dewan direksi perusahaan}}$$

Pendelegasian Dewan Komite Lingkungan (X2)

Dewan lingkungan perusahaan bertanggung jawab atas strategi lingkungan untuk perusahaan, dan selanjutnya strategi ini harus ditegakkan secara proaktif (Ortiz-de-Mandojana et al., 2016). Karena tekanan peraturan yang tinggi, telah menjadi praktik umum dalam organisasi untuk memiliki komite terpisah yang menangani masalah lingkungan (Dixon-Fowler et al., 2017). Komite-komite ini juga dikenal sebagai komite tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan komite lingkungan perusahaan diukur dengan cara diberi nilai 1 jika ada dalam suatu organisasi, jika tidak ada diberi nilai 0 (Tingbani et al., 2020).

Kepemilikan Institusional (X3)

Kepemilikan institusional atau dikenal dengan pemegang saham institusional dipandang sebagai anggota investor khusus yang besaran kepemilikan sahamnya relatif besar sehingga memiliki pengaruh yang vital (Schnatterly et al., 2008; Chang dan Zhang, 2015). Semakin tinggi tingkat pemilikan institusional suatu organisasi, semakin besar upaya pemantauan manajer sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah kepemilikan saham institusional dibagi total saham perusahaan yang beredar (Yuliawati, dkk., 2020).

$$IO = \frac{\text{Total saham institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Asing (X4)

Kepemilikan asing adalah jumlah modal tertentu dalam suatu entitas bisnis yang dipegang oleh kekuasaan asing. Bukti menyatakan, banyak perusahaan yang berkembang di berbagai negara telah terpengaruh oleh praktik manajemen gaya barat, termasuk praktik akuntansi lingkungan. Negara-negara Eropa dan Amerika dinilai lebih mengedepankan isu-isu lingkungan dalam setiap hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaannya. Kepemilikan asing dihitung dengan jumlah kepemilikan saham asing dibagi jumlah saham perusahaan yang beredar (Julekhah, dkk., 2019).

$$FO = \frac{\text{Total saham asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Regulasi Pemerintah (X5)

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh perseroan terbatas yang aktivitas operasinya berkenaan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk dapat melaporkan segala aktivitas mengenai TJSL yang sudah dilaksanakan suatu korporasi ke dalam laporan tahunan ataupun *sustainability report* sehingga perusahaan dapat melaporkan bahwa mereka telah menaati ketentuan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pada penelitian dari Faisal, et al. (2019) regulasi pemerintah dihitung menggunakan variabel *dummy*. Apabila perusahaan memenuhi kriteria penilaian ketaatan maka diberi nilai 1, namun apabila perusahaan tidak memenuhi kriteria penilaian ketaatan maka diberi nilai 0.

Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas adalah kapabilitas bisnis untuk menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu. Bisnis yang berlabar tinggi memberikan informasi yang lebih komprehensif sehingga kemungkinan untuk dapat melakukan pengungkapan lingkungan cenderung besar. Pemangku kepentingan perlu meningkatkan citra karena mereka menghargai entitas bisnis yang dengan baik dan mempublikasikan lebih banyak informasi lingkungan. Dalam studi ini, ukuran profitabilitas perusahaan dihitung dengan menggunakan rumus ROA (*Return of Asset*), yaitu laba setelah pajak dibagi total aset (Chu et al., 2013).

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan kekayaan atau aset yang tercatat dalam suatu entitas. Semakin besar ukuran sebuah korporasi maka semakin luas pula pemegang kepentingannya sehingga kepedulian terhadap lingkungan juga dianggap relatif besar. Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan logaritma natural total aset (Sholekah & Venusita, 2014).

$$CS = \text{Ln natural (total aset)}$$

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam studi ini, antara lain:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan *annual report* dan *sustainability report* berturut-turut pada periode 2016-2019.
3. Informasi pengungkapan akuntansi lingkungan diungkapkan pada *annual report* dan *sustainability report* perusahaan bersangkutan selama periode 2016-2019.
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel riset ini.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada studi ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan analisis yang dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Janie, Dyah, 2012). Rumus regresi linear berganda pada studi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 FB + \beta_2 EC + \beta_3 IO + \beta_4 FO + \beta_5 GOVREG + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Environmental accounting disclosure</i>
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
FB	= <i>Female Board</i>
EC	= <i>Environmental Committee</i>
IO	= <i>Institutional Ownership</i>
FO	= <i>Foreign Ownership</i>
GOVREG	= <i>Government Regulation</i>
e	= <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam studi ini menggunakan entitas manufaktur yang tercatat pada BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2016-2019.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

Keterangan	2016	2017	2018	2019	Total
Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2016 sampai 2019	144	156	167	184	651
Perusahaan manufaktur yang dieliminasi dikarenakan tidak terdapat informasi pengungkapan akuntansi lingkungan yang diungkapkan pada laporan tahunan dan <i>sustainability report</i> perusahaan bersangkutan selama periode 2016 sampai 2019	(126)	(138)	(149)	(166)	(579)
Sampel penelitian	18	18	18	18	72

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EAD	72	0.36	2.43	1.4040	0.57733
FB	72	0.00	0.33	0.0457	0.09287
IO	72	1.29	98.85	64.8271	33.35310
FO	72	0.01	95.36	37.3122	34.63061
ROA	72	-1.13	0.11	-0.0034	0.14403
CS	72	5.26	27.74	17.5378	5.01512
Valid N (listwise)	72				

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada uji normalitas yang ditampilkan pada tabel 3 menunjukkan hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah 0,492. Dapat disimpulkan bahwa data pada studi ini terdistribusi normal karena telah melebihi nilai signifikansi sejumlah 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.36226350
Most Extreme Differences	Absolute	0.098
	Positive	0.050
	Negative	-0.098
Kolmogorov-Smirnov Z		0.833
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.492

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan semua hasil $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

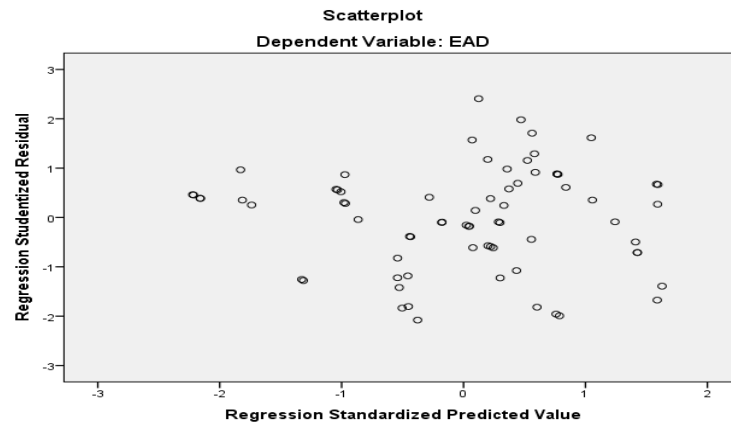
Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
FB	0.754	1.326
EC	0.909	1.100
IO	0.566	1.767
FO	0.613	1.630
GOVREG	0.626	1.599
ROA	0.953	1.049
CS	0.523	1.911

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa titik yang tersebar di sumbu Y yaitu disekitar 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Artinya, dilihat berdasarkan gambar pola tersebut menunjukkan bahwa tidak berlangsung heteroskedastisitas pada data studi ini.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari hasil uji *Runs-test* adalah sebesar 0,097 yang mana angka tersebut telah melampaui 0,05 sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa hasil uji autokorelasi pada penelitian ini tidak ditemukan masalah autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0.07124
Cases < Test Value	36
Cases >= Test Value	36
Total Cases	72
Number of Runs	30
Z	-1.662
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.097

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 6, diketahui R² tercermin dari nilai *adjusted R²* yaitu sejumlah 0,606. Perolehan nilai R² pada tabel di atas memiliki arti bahwa seluruh variabel efektifitas dapat menjelaskan variabel dependen dalam studi ini (pengungkapan akuntansi lingkungan) sejumlah 0,606 atau 60,6%. Lalu sisanya, yaitu sebesar 39,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam studi ini.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.779 ^a	0.606	0.563	0.38156

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan tabel 7, nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,0000 dimana angka tersebut berada di bawah 0,05 dan nilai F hitung sebesar 14,078 sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan.

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Simultan

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.347	7	2.050	14.078	0.000 ^b
	Residual	9.318	64	0.146		
	Total	23.665	71			

Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t)

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Parameter

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.026	0.341		5.944	0.000		
	FB	1.350	0.561	0.217	2.405	0.019	0.754	1.326
	EC	0.041	0.095	0.035	0.431	0.668	0.909	1.100
	IO	0.000	0.002	-0.025	-0.239	0.812	0.566	1.767
	FO	-0.005	0.002	-0.277	-2.766	0.007	0.613	1.630
	GOVREG	0.404	0.129	0.311	3.132	0.003	0.626	1.599
	ROA	-0.034	0.322	-0.008	-0.104	0.917	0.953	1.049
	CS	-0.046	0.012	-0.398	-3.671	0.000	0.523	1.911

Interpretasi Hasil

Hasil uji t dari variabel independen keberagaman gender dewan direksi terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menghasilkan nilai koefisien sebesar 1,350 dan tingkat signifikansi sebesar 0,019. Maka dapat disimpulkan, semakin perusahaan manufaktur memiliki dewan direksi beragam gender maka semakin tinggi pula pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Berdasarkan tabel 8 disimpulkan bahwa variabel keberagaman gender memiliki hubungan positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Maka Hipotesis 1 diterima. Temuan studi ini sejalan dengan hasil riset dari Tingbani, dkk. (2020) dan Liao et al (2014) sebagaimana dijelaskan bahwa pengaruh keberagaman gender dewan direksi memiliki arah positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela *Green House Gas*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan riset dari Prado Lorenzo and Garcia sanchez (2010) sebagaimana dinyatakan bahwa direksi wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Green House Gas*.

Hasil uji t dari variabel independen pendelegasian komite lingkungan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan koefisien bernilai positif sebesar 0,041 dan tingkat signifikansi sebesar 0,668. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat pendelegasian komite lingkungan terhadap perusahaan manufaktur maka semakin tinggi pula pengungkapan informasi akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan manufaktur tersebut. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel pendelegasian komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan tetapi tidak signifikan dikarenakan tingkat signifikansi variabel di atas 0,05. Maka Hipotesis 2 ditolak. Temuan studi ini selaras dengan hasil riset dari Tingbani, dkk. (2020) dimana menjelaskan komite lingkungan mempunyai arah positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela GHG.

Hasil uji t dari variabel independen kepemilikan institusional terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan koefisien bernilai negatif sebesar 0,000 dan tingkat signifikansi sebesar 0,812. Maka dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional terhadap perusahaan manufaktur maka semakin tinggi pula pengungkapan informasi akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan manufaktur tersebut. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

pengungkapan informasi akuntansi lingkungan tetapi tidak signifikan dikarenakan tingkat signifikansi variabel di atas 0,05. Maka Hipotesis 3 ditolak. Temuan studi ini tidak sejalan dengan riset dari Yuliawati, dkk. (2020) dan Raverte (2008) yang menghasilkan temuan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan korporasi bisnis. Tetapi temuan studi ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nurkin (2009) yang menghasilkan temuan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil uji t dari variabel independen kepemilikan asing terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan koefisien bernilai positif sebesar -0,005 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Hasil tersebut menunjukkan apabila kepemilikan asing meningkat sebesar 1% maka tingkat pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menurun sebesar -0,005. Berdasarkan tabel 8 disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing mempunyai arah negatif dan signifikan karena tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 namun antara hubungan yang dimiliki koefisien dengan hipotesis yang diajukan tidak memiliki hubungan searah.. Maka Hipotesis 4 ditolak. Hasil studi ini sejalan dengan riset dari Julekhah dan Rahmawati (2019) dimana menghasilkan temuan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Berbanding terbalik dengan temuan riset Oh dan Chang (2011); Soliman dkk. (2012); dan Muttakin dan Subramaniam (2015) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Hasil uji t dari variabel independen regulasi pemerintah terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,404 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Maka dapat disimpulkan, semakin perusahaan manufaktur taat kepada regulasi pemerintah maka semakin tinggi pula pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Berdasarkan tabel 8 disimpulkan bahwa variabel regulasi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan. Maka Hipotesis 5 diterima. Temuan studi ini sejalan dengan hasil riset dari Faisal dkk. (2020) yaitu menunjukkan peraturan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CSER).

Hasil uji t variabel kontrol profitabilitas perusahaan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan nilai koefisien positif sebesar -0,034 dan tingkat signifikansi sebesar 0,917. Hasil tersebut menunjukkan apabila profitabilitas perusahaan meningkat sebesar 1% maka tingkat pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menurun sebesar -0,034. Berdasarkan tabel 8 disimpulkan bahwa variabel profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

Hasil uji t variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -0,046 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1% maka tingkat pengungkapan informasi akuntansi lingkungan menurun sebesar -0,046. Berdasarkan tabel 8 dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai arah negatif dan signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keberagaman gender dewan direksi dan regulasi pemerintah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, sedangkan variabel pendelegasian komite lingkungan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan, serta variabel kepemilikan asing mempunyai arah negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana pada penelitian ini hanya menghasilkan total sampel sebanyak 72 sampel, hal ini dikarenakan terbatasnya perusahaan yang memiliki indikator pengungkapan akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan dan *sustainability report* yang berturut-turut selama 2016-2019. Berdasarkan

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, saran yang dapat penulis sampaikan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambah ukuran atau jumlah sampel dengan menyertakan jenis perusahaan lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, selain perusahaan manufaktur.
2. Menambah jumlah variabel independen yang lain dan alternatif pengukuran lain agar dapat menemukan faktor pengaruh lain terhadap pengungkapan informasi akuntansi lingkungan.

REFERENSI

- Carolina, V., & Martusa, R. (2012). Akuntansi Lingkungan : Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis Dan Investasi*.
- Chang, K., & Zhang, L. (2015). The effects of corporate ownership structure on environmental information disclosure—Empirical evidence from unbalanced panel data in heavy-pollution industries in China. *WSEAS Transactions on Systems and Kontrol*, 10(1996), 405–414.
- Chu, C. I., Chatterjee, B., & Brown, A. (2013). The Current Status of Greenhouse Gas Reporting by Chinese Companies. *Managerial Auditing Journal*, 28(2), 114–139.
- Dixon-Fowler, H. R., Ellstrand, A. E., & Johnson, J. L. (2017). The Role of Board Environmental Committees in Corporate Environmental Performance. *Journal of Business Ethics*, 140(3), 423–438. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2664-7>
- Faisal, F., Situmorang, L. S., Achmad, T., & Prastiwi, A. (2020). The role of government regulations in enhancing corporate social responsibility disclosure and firm value. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 509–518. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO8.509>
- Hadi, Nor. (2014). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Muhammad Rizal. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2001.
- Hidayat, Muhammad. "Perkembangan Green Accounting Dan Penerapannya Dalam Menjawab Permasalahan Lingkungan Di Indonesia." *OPINI* 1.4 (2016).
- Hidayat, N. dkk. (2018). *Bahaya Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga terhadap Lingkungan*. 1–45.
- Julekhah, F., & Rahmawati, E. (2019). The Influence of Media Exposure, Industry Sensitivity, Foreign Ownership, Publik Ownership and Profitability on Environmental Disclosure and The Impact on Firm Value. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 50–66.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *British Accounting Review*, 47(4), 409–424. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002>
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green accounting practices: lesson from an emerging economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456–478. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2017-0013>
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138–165.
- Nurkhin. (2009). Corporate governance dan profitabilitas pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1–97.
- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z>
- Ortiz-de-Mandojana, N., Aguilera-Caracuel, J., & Morales-Raya, M. (2016). Corporate Governance and Environmental Sustainability: The Moderating Role of the National

- Institutional Context. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 23(3), 150–164. <https://doi.org/10.1002/csr.1367>
- Peters, Gary F., and Andrea M. Romi. "The association between sustainability governance characteristics and the assurance of corporate sustainability reports." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 34.1 (2015): 163-198.
- Putri, T. R., Sari, R. N., & Sari, R. N. (2013). Pengaruh Kepemilikan Asing , Kinerja Lingkungan Dan Pengaruh Politik Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(9), 268–285.
- Ramdhony, D. (2015). Corporate Social Reporting By Mauritian Banks. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 56. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v5i2.8067>
- Rao, K. K., Tilt, C. A., & Lester, L. H. (2012). Corporate governance and environmental reporting: An Australian study. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 12(2), 143–163. <https://doi.org/10.1108/14720701211214052>
- Reverte, C. (2009). Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms. *Journal of Business Ethics*, 88(2), 351–366. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9>
- Ridwan, I. R. (2016). Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial. *Jurnal Geografi Gea*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>
- Schnatterly, K., Shaw, K. W., & Jennings, W. W. (2008). Information advantages of large institutional owners. *Strategic Management Journal*, 29(2), 219–227. <https://doi.org/10.1002/smj.654>
- Sholekah, F. W., & Venusita, L. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Firm Size, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(3), 795–807.
- Soliman, M. M., El Din, M. B., & Sakr, A. (2014). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility an Empirical Study of the Listed Companies in the Stock Market of Egypt. *European Journal of Business Research*, 14(1), 53–68. <https://doi.org/10.18374/ejbr-14-1.5>
- Susilo, J. (2008). Green Accounting di Daeran Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 149–165.
- Tingbani, I., Chithambo, L., Tauringana, V., & Papanikolaou, N. (2020). Board gender diversity, environmental committee and greenhouse gas voluntary disclosures. *Business Strategy and the Environment*, 29(6), 2194–2210. <https://doi.org/10.1002/bse.2495>
- Yuliawati, G. A. W., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 27–34.